

SUMBER DAYA ALAM : KONFLIK AGRARIA DOMINAN DI AREAL HUTAN

Konflik-konflik agraria di Indonesia sepanjang 2013 masih didominasi di areal hutan. Kasus-kasus ini diprediksi akan semakin meningkat seiring efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, Selasa (31/12), di Jakarta, menyebutkan, sepanjang tahun 2013 terjadi 369 konflik agraria dengan luas 1,28 juta hektar dan melibatkan 139.874 keluarga. Dibanding tahun 2012, dari sisi luasan konflik meningkat 33 persen, sedangkan dari sisi jumlah meningkat 86,36 persen. Jumlah korban jiwa akibat konflik mencapai 21 orang atau meningkat dibanding tahun lalu (3 jiwa).

Konflik perkebunan yang terbanyak, yaitu 180 konflik, disusul infrastruktur (105), pertambangan (38), kehutanan (31), pesisir/kelautan (9), dan lain-lain (6). Dilihat dari sisi luas areal konflik lebih dominan sektor kehutanan (545.258 hektar), perkebunan (527.939 ha), tambang (197.366 ha), infrastruktur (35.466 ha), dan perairan (184 ha).

"Namun, kalau dilihat pokoknya, konflik sektor perkebunan dan pertambangan ini juga di areal pinjam-pakai atau hutan yang dapat dikonversi di kawasan hutan. Bisa dikatakan, kehutanan merupakan muasal pokok dari konflik agraria ini," kata Iwan.

Salah satu pemicu konflik adalah kebijakan lama berupa penunjukan kawasan hutan di 70 persen daratan Nusantara. Ini membuat 30.000 desa definitif berada di area yang dikategorikan sebagai kawasan hutan.

"Dengan begitu, posisi dan hak masyarakat desa atas wilayah tinggal dan wilayah kelolanya menjadi sangat rentan dari upaya-upaya pencerabutan sepihak oleh pejabat publik atau perusahaan yang mengantongi izin eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam," tutur Iwan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang memisahkan antara hutan hak (masyarakat adat) dan hutan negara, menurut Iwan, belum ada implementasi di ranah pemerintah. Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah pemetaan partisipatif atas wilayah-wilayah hutan masyarakat adat.

Hendrik Siregar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan, konflik pertambangan yang tercatat di KPA lebih besar dibanding Jatam. Catatannya, terdapat 24 konflik pertambangan sepanjang 2013.

Lebih lanjut ia memperkirakan, konflik pertanahan makin meningkat seiring proyek-proyek MP3EI, terlebih tahun depan segera memasuki tahun politik. "Pejabat mengumpulkan uang untuk kampanye. Salah satu cara dengan menjual izin pemanfaatan lahan. Sementara skenario penyelesaian konflik tak ada," ucapnya. (ICH)